

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya sebagai wujud apresiasi saya kepada Prof. Dr. Tjuk Wirawan, SH selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) dalam proses penyelesaian penelitian tesis yang berjudul Tanggung Jawab Pemerintah daerah dalam rangka melindungi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang No 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Atas pembinaan, bimbingan serta arahan beliau, tesis ini dapat saya selesaikan dengan baik sesuai kemampuan.

Ucapan terima kasih serupa saya haturkan kepada bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, MHum sebagai Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang penuh perhatian, kesabaran dalam memberikan dorongan dan kontribusi luar biasa atas karya akademik ini.

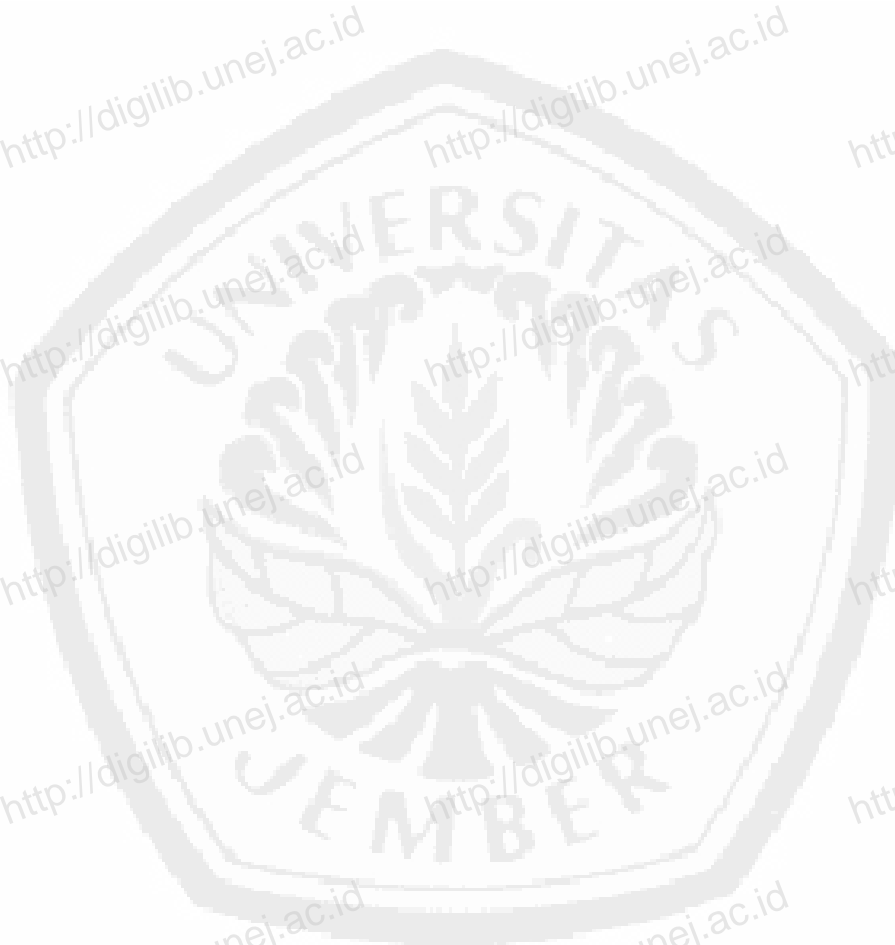
Perkenankan pula melalui lembaran tesis ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Tarsicius Suticto, MSC atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada program studi Magister Ilmu Hukum.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Jember yang dijabat.....atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa program magister pada program pascasarjana Universitas Jember.
3. Ketua Program Studi magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Ratu, SH, MSi atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum.
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh.....atas segala dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir penelitian tesis ini.
5. Prof. Dr. Arief Amirullah, SH, MHum dekan fakultas Hukum Universitas Jember atas perhatiannya dan dorongan semangatnya.

Semoga karya tulis ini Konstituif bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya menyangkut Hukum Ketatanegaran.

Penulis

Cora Elly Noviati, SH



Ringkasan

Tesis ini berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ilmu Hukum yang di angkat dalam penelitian ini ada 3 hal :

1. Menyangkut tentang Pemerintah daerah yang telah menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia asal daerahnya di Luar Negeri.
2. Tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan Pemerintah Undang-Undang Nomor 39/2004
3. Tentang hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal daerahnya di Luar Negeri. Penelitian ini dilakukan dengan tipe Yuridis Normatif yakni type penelitian yang menjawab isu hokum dengan mengkaji substansi perundang-undang berdasarkan asas-asas hukum, teori hukum, pendapat hukum dan norma yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undang (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak di jawab. Hal ini dilakukan untuk menggali konsistensi dan kesesuaian diantara peraturan perundang-undangan termasuk antara undang-undang dengan undang-undang dasar terhadap regulasi dan undang-undang. Berdasarkan kajian dan analisa yang dilakukan dapat disajikan beberapa hal sebagai jawaban atas isu hukum antara lain bahwa :

Pertama, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/Kota belum optimal menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia asal daerahnya di Luar Negeri. Beberapa fakta penghambat diantaranya, karena faktor keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar negeri. Keterbatasan anggaran untuk melakukan pendampingan/advokasi terhadap para Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah di Luar Negeri.

Kedua, bentuk perlindungan hukum yang diberikan yang diberikan oleh pemerintah daerah belum optimal dilakukan sesuai dengan perintah undang-undang nomor 39/2004, pemerintah daerah sebatas baru mengantisipasi perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia serta preferentif melalui prosedur atau mengantisipasi perjalanan bagi perusahaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau ijin untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri, pemerintah daerah masih belum bangkit dalam memberikan pelayanan pendampingan serta advokasi, termasuk dalam rangka melakukan koordinasi teknis dengan instansi-instansi teknis yang ada baik di pusat maupun di Luar Negeri.

Ketiga, hambatan-hambatan yang ditemui oleh pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal daerahnya di Luar Negeri diantaranya adalah lemahnya pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia bermasalah di Luar Negeri. Lemahnya koordinasi dengan pihak pemerintah pusat lembaga-lembaga/institusi di Luar Negeri tempat Tenaga Kerja Indonesia bekerja dan menemui masalah, kurang mampu dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan yang baik, sehingga jalan yang diambil bersifat pragmatis dan setengah hati untuk memberi bantuan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dan keterbatasan anggaran yang tersedia untuk memberikan kegiatan advokasi/pendampingan bagi para Tenaga Kerja Indonesia bermasalah di Luar Negeri dan aspek-aspek teknis lainnya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam penelitian ini juga disampaikan agar pemerintah secara intensif melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dan semaksimal mungkin memberlakukan undang-undang yang ada sesuai dengan Undang-undang nomor 39/2004.

Kata Pengantar

Tesis ini berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri. Judul tesis bermaksud merupakan refleksi isu hukum atas materi persoalan sebagai wujud komitmen saya selaku dosen yang membina mata kuliah Hukum Tata Negara di Universitas Moch. Sroedji Jember.

Dari kacamata Tri Dharma Perguruan Tinggi, hasil penelitian tesis tersebut secara fungsional merupakan presepsi hukum terhadap Undang-undang Nomor 39/20024 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sampai saat ini permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak ada habis-habisnya selalu muncul dan timbul kasus-kasus penyiksaan hingga Tenaga Kerja Indonesia sampai-sampai melakukan tindakan yang sangat tidak diinginkan yaitu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.

Saya berharap melalui tesis ini siapapun para pihak yang memiliki kompetensidi bidang hukum ketatanegaraan termasuk secara praktis Penyaluran Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang menyalurkan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri khususnya Disnaker setempat, agar supaya bias membangun kerja sama yang baik mulai pra penempatan dan setelah penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta bias memantau daerah yang ditempati Tenaga Kerja Indonesia tersebut. Agar supaya dapat meminimalisir kasus-kasus dan permasalahan-permasalahan yang ada di Luar Negeri.

Jember, 2 Maret 2011

Penulis

Cora Elly Noviati, SH



Tesis

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**RESPONSIBILITY OF REGIONAL GOVERNMENT TO GIVE LEGAL
PROTECTION FOR THE INDONESIAN WORKERS ABROAD**

Oleh :

Cora Elly Noviati, SH

NIM : 080720101006

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Ekonomi

Fakultas Hukum

Universitas Jember

2011

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**RESPONSIBILITY OF REGIONAL GOVERNMENT TO GIVE LEGAL
PROTECTION FOR THE INDONESIAN WORKERS ABROAD**

Tesis

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pasca Sarjana
Universitas Jember**

Oleh :

Cora Elly Noviati, SH

NIM : 080720101006

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Ekonomi**

Fakultas Hukum

Universitas Jember

2011

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun Universitas lain.
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 25 April 2011

Yang membuat pernyataan

Cora Elly Noviati, SH

NIM. 080 720 101 006

Daftar Isi

	Halaman
Sampul Depan.....	i
Sampul Dalam.....	ii
Prasyarat gelar.....	iii
Persetujuan.....	iv
Identitas Tim Penguji.....	v
Pernyataan Orisinalitas.....	vi
Ucapan terima kasih.....	vii
Ringkasan.....	ix
Summary.....	xi
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	xiv
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1. Tujuan penelitian.....	7
1.3.2. Manfaat penelitian.....	9
1.4. Metodologi Penelitian	
1.4.1. Tipe Penelitian.....	9
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	10
1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.4.5. Analisis Bahan Hukum.....	12
Bab II Tinjauan Pustaka	
2.1. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Konsep Negara Negara Hukum Modern.....	13
2.1.1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintah Daerah.....	16
2.1.2. Pengertian Tanggung Jawab.....	29
2.2. Fungsi Hukum dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia.....	35

2.3	Pemerintah daerah dan Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan Di Era Otonomi Daerah	44
2.4	Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Daerahnya Di Luar Negeri	52
2.5	Peran Pemerintah Indonesia Terhadap TKI Yang Menimba Buruh Migran Perempuan	60
	Bab III Kerangka Konseptual	66
	Bab IV Hasil Pengkajian	
4.1	Deskripsi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri	64
4.2	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004	73
4.3	Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerahnya Ke Luar Negeri	88
4.3.1	Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Provinsi	89
4.3.2	Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota	93
4.4	Hambatan-Hambatan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	114
4.5	Alternatif Pemecahan Masalah Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri	116
	Bab V Penutup	
5.1	Kesimpulan	119
5.2	Saran	120
	Daftar Pustaka	122